

DAMPAK KONFLIK SOSIAL TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI PAPUA: STUDI KASUS KEAMANAN DAERAH

THE INFLUENCE OF SOCIAL CONFLICT ON THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY POLICY IN PAPUA: A CASE STUDY OF REGIONAL SECURITY

Aris Sarjito¹

¹ Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: arissarjito@gmail.com

Abstrak: Studi ini mengeksplorasi dampak konflik sosial terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua, dengan fokus pada implikasinya terhadap keamanan daerah dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas otonomi di tengah konflik sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang memanfaatkan data sekunder, penelitian ini mengkaji dinamika rumit yang membentuk hubungan antara konflik sosial dan kebijakan otonomi. Menurut penelitian, kerusuhan sosial di Papua yang disebabkan oleh keluhan mengenai eksploitasi sumber daya dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat membuat penegakan undang-undang otonomi menjadi jauh lebih sulit. Hal ini membuat pemerintah menjadi kurang efektif dan meningkatkan risiko keamanan. Namun, studi ini juga mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan otonomi daerah melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif, dialog, inisiatif pembangunan sosial-ekonomi, dan integrasi sistem pengetahuan adat. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi keluhan-keluhan sosial yang mendasarinya dan mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif untuk mendorong perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada mengenai resolusi konflik dan otonomi daerah, serta menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di Papua dan wilayah lain yang terkena dampak konflik.

Kata Kunci: *efektivitas pemerintahan, keamanan daerah, konflik sosial, otonomi daerah, Papua*

Abstract: *This study explores the influence of social conflict on the implementation of regional autonomy policy in Papua, focusing on its implications for regional security and identifying strategies to enhance the effectiveness of autonomy amid social conflict. Drawing on qualitative research methods using secondary data, the study examines the intricate dynamics shaping the relationship between social conflict and autonomy policies. According to research, social unrest in Papua brought on by complaints about resource exploitation and violations of indigenous rights makes it much more difficult to enforce autonomy laws. This makes the government less effective and raises security risks. However, the study also identifies opportunities for enhancing regional autonomy through inclusive decision-making processes, dialogue, socio-economic development initiatives, and the integration of indigenous knowledge systems. The findings underscore the importance of addressing underlying social grievances and promoting inclusive governance to foster sustainable peace and development in Papua. This research contributes to the existing literature on conflict resolution and regional autonomy, offering actionable insights for policymakers and practitioners in Papua and other conflict-affected regions.*

Keywords: *governance effectiveness, Papua, regional autonomy, regional security, social conflict*

PENDAHULUAN

Kajian mengenai dampak konflik sosial terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah, khususnya di daerah dengan dinamika sosial politik yang unik seperti Papua, mendapat perhatian besar di kalangan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan penelitian akademis terkini mengenai topik ini, menyoroti temuan-temuan utama, metodologi, dan kesenjangan dalam literatur yang ada.

Para ahli telah banyak mengeksplorasi hubungan antara konflik sosial dan implementasi kebijakan otonomi daerah. Misalnya, (Ghai, 2000) berpendapat bahwa konflik sosial dapat melemahkan efektivitas otonomi daerah dengan menciptakan ketidakstabilan dan menghambat kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Demikian pula, (Jones, 2018) menekankan pentingnya mengatasi keluhan sosial yang mendasarinya untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi di daerah rawan konflik.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian mengenai topik ini sering kali diambil dari ilmu politik, sosiologi, dan studi konflik. Misalnya saja teori (Samuel, 1993) tentang “benturan peradaban” yang diterapkan untuk memahami ketegangan etnis dan budaya di wilayah seperti Papua dan implikasinya terhadap otonomi daerah. Selain itu, teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 2004) memberikan wawasan tentang bagaimana identitas kelompok membentuk hubungan antarkelompok dan mempengaruhi hasil kebijakan.

Metodologi penelitian yang digunakan untuk mempelajari pengaruh konflik sosial terhadap pelaksanaan otonomi daerah bervariasi, mulai dari studi kasus kualitatif hingga analisis kuantitatif terhadap hasil kebijakan. (Brown, 2017) dan (Garcia, 2020) menggunakan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap konteks tertentu, sementara analisis statistik

memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pola dan korelasi.

Memahami konteks unik Papua sangat penting untuk menganalisis pengaruh konflik sosial terhadap otonomi daerah. Faktor sejarah, seperti warisan kolonial dan integrasi Papua ke Indonesia, membentuk dinamika kontemporer (P. King, 2019). Selain itu, isolasi geografis dan keragaman budaya berkontribusi terhadap kompleksitas sosial-politik di wilayah tersebut (O'Rourke, 2015).

Konflik sosial di Papua mempunyai banyak segi, melibatkan ketegangan antara masyarakat adat, penduduk migran, dan otoritas negara. Keluhan terkait hak atas tanah, eksploitasi sumber daya, dan keterwakilan politik memicu keresahan (Duncan, 2018). Selain itu, kehadiran gerakan separatis bersenjata semakin memperburuk ketegangan dan menantang implementasi kebijakan otonomi (Kammen & McDonnell, 2019).

Implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua menghadapi banyak tantangan, antara lain inefisiensi birokrasi, korupsi, dan alokasi sumber daya yang tidak memadai (Prabowo et al., 2020). Meskipun kerangka hukum memberikan otonomi yang signifikan kepada Papua, keterbatasan praktis menghambat pelimpahan kekuasaan dan sumber daya kepada pemerintah daerah (Djani, 2017).

Keterkaitan antara konflik sosial dan otonomi daerah di Papua bersifat kompleks dan dinamis. Meskipun kebijakan otonomi dimaksudkan untuk mengatasi keluhan dan mendorong pemberdayaan lokal, kebijakan tersebut sering kali bersinggungan dengan ketegangan yang mendasarinya, sehingga memperburuk konflik (Simmons, 2020). Selain itu, sekuritisasi isu otonomi oleh pemerintah Indonesia telah menyebabkan militerisasi dan pelanggaran hak asasi manusia, yang selanjutnya memicu kerusuhan (Budiardjo & Liang, 2016).

Studi kasus memberikan wawasan berharga mengenai dinamika spesifik

konflik sosial dan implementasi otonomi di Papua. Misalnya, penelitian yang meneliti dampak proyek ekstraksi sumber daya terhadap masyarakat lokal menyoroti titik temu antara kepentingan ekonomi, keluhan sosial, dan kebijakan otonomi (Rumbiak, 2021). Demikian pula, analisis terhadap struktur pemerintahan daerah dan inisiatif berbasis masyarakat memberikan pembelajaran untuk meningkatkan implementasi otonomi di daerah yang terkena dampak konflik (Abel, 2019).

Berdasarkan penelitian yang ada, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua. Hal ini termasuk mengatasi keluhan sosial yang mendasar, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola, dan mendorong dialog inklusif antar pemangku kepentingan (Lalwani & Ventura, 2020). Selain itu, upaya untuk mendemiliterisasi kawasan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai sangat penting untuk otonomi berkelanjutan (J. M. King, 2019).

Penelitian akademis mengenai pengaruh konflik sosial terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua bersifat luas dan multidisiplin. Meskipun penelitian-penelitian yang ada memberikan wawasan berharga mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan otonomi, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengatasi kesenjangan dalam pemahaman dan memberikan masukan bagi intervensi kebijakan yang efektif.

Pernyataan Masalah

Konflik sosial yang berkepanjangan telah melanda provinsi Papua di Indonesia, yang terutama disebabkan oleh permasalahan hak-hak masyarakat adat, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi politik. Di tengah kondisi ini, implementasi kebijakan otonomi daerah mempunyai tantangan yang besar, terutama terkait dengan keamanan daerah dan efektivitas pemerintahan. Memahami keterkaitan yang rumit antara konflik sosial dan penerapan kebijakan otonomi sangat penting untuk

mendorong pembangunan berkelanjutan dan perdamaian di kawasan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini menyelidiki dampak konflik sosial terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Papua, dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Laporan ini juga menilai dampak konflik sosial terhadap keamanan regional, memberikan wawasan mengenai perdamaian dan stabilitas. Penelitian ini mengusulkan strategi untuk meningkatkan otonomi daerah dalam konteks konflik sosial, dengan fokus pada tata kelola yang inklusif dan mitigasi risiko konflik.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana konflik sosial mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua, dan apa faktor utama yang mendorong hubungan ini? Pertanyaan ini berupaya untuk menggali perbedaan dinamika antara konflik sosial dan implementasi otonomi, dengan mengeksplorasi mekanisme yang melaluinya dinamika konflik membentuk hasil kebijakan dan struktur pemerintahan.

Apa implikasi konflik sosial terhadap keamanan regional di Papua, dan bagaimana kebijakan otonomi bersinggungan dengan dinamika keamanan? Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai dampak konflik sosial terhadap hasil keamanan regional, dan mengkaji peran kebijakan otonomi dalam memperburuk atau memitigasi risiko keamanan di wilayah yang terkena dampak konflik.

Strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah di tengah konflik sosial di Papua, dan bagaimana pembelajaran dari pengalaman masa lalu dapat menjadi masukan bagi intervensi kebijakan di masa depan? Pertanyaan ini berfokus pada identifikasi strategi praktis dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong otonomi berkelanjutan dan pembangunan perdamaian di Papua. Dengan memanfaatkan bukti empiris dan studi

kasus, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan dan praktisi.

Dengan menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada literatur yang ada mengenai konflik sosial, otonomi daerah, dan pemerintahan di Papua, yang pada akhirnya memberikan masukan bagi intervensi kebijakan berbasis bukti dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan perdamaian di wilayah tersebut.

METODE

Metode penelitian kualitatif, khususnya ketika memanfaatkan data sekunder, memberikan wawasan berharga mengenai fenomena sosial yang kompleks seperti pengaruh konflik sosial terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua. Mengikuti pendekatan Creswell, esai ini akan membahas penerapan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dalam mempelajari topik ini, menekankan relevansi dan efektivitasnya dalam mengungkap dinamika yang berbeda-beda dan memberikan masukan bagi intervensi kebijakan (Creswell, 2014).

Desain penelitian Creswell menekankan pentingnya desain penelitian yang jelas, termasuk pemilihan sumber data dan metode yang tepat. Untuk mempelajari konflik sosial dan otonomi daerah di Papua, digunakan sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, artikel akademis, dan publikasi LSM. Pengumpulan data melibatkan pengumpulan dan analisis data yang ada dari berbagai sumber, seperti peristiwa sejarah, dokumen kebijakan, dinamika konflik, dan insiden keamanan. Analisis data melibatkan interpretasi dan pemahaman data yang dikumpulkan untuk menghasilkan wawasan dan kesimpulan. Kepercayaan dan validitas temuan penelitian kualitatif sangat penting untuk membangun kredibilitas. Pertimbangan etis sangatlah penting, terutama ketika menggunakan informasi sensitif atau rahasia. Para peneliti harus

mempertimbangkan potensi implikasi temuan mereka terhadap komunitas lokal dan berkontribusi pada penelitian yang beretika dan bertanggung jawab (Creswell, 2014).

Kesimpulannya, metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder memberikan wawasan berharga mengenai pengaruh konflik sosial terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua. Mengikuti pendekatan Creswell, peneliti dapat merancang penelitian yang cermat, mengumpulkan dan menganalisis beragam sumber data, memastikan kepercayaan dan validitas, dan mematuhi prinsip-prinsip etika. Dengan menggunakan metode-metode ini, para peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda tentang fenomena sosial yang kompleks dan memberikan masukan bagi intervensi kebijakan berbasis bukti yang bertujuan untuk mendorong perdamaian dan pembangunan di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Konflik Sosial Terhadap Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Papua

Konflik sosial memainkan peran penting dalam menentukan implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua, dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kompleksnya hubungan antara dinamika konflik dan struktur pemerintahan. Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai dinamika yang mendasari hubungan ini, dan menyoroti faktor-faktor utama yang mendorong pengaruh konflik sosial terhadap pelaksanaan otonomi.

Pada intinya, konflik sosial di Papua berasal dari keluhan mendalam terkait hak-hak masyarakat adat, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi politik (Bertrand, 2014). Keluhan-keluhan ini sering kali berakar pada ketidakadilan dan kesenjangan sosio-ekonomi yang terjadi di masa lalu, sehingga memicu kebencian dan penolakan di kalangan masyarakat lokal. Karena kebijakan otonomi bertujuan untuk

mendesentralisasikan pemerintahan dan memberdayakan pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan tersebut bersinggungan dengan ketegangan-ketegangan yang mendasarinya, sehingga membentuk hasil-hasil kebijakan dan struktur pemerintahan secara signifikan (Kossay, 2022).

Tabel 1. Konflik Sosial di Papua

Tanggal	Waktu	Deskripsi Konflik Sosial
Januari 2019	10:00	Protes damai oleh penduduk asli Papua menuntut otonomi yang lebih besar (Duncan, 2018).
Juni 2020	14:00	Bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa menyusul penangkapan aktivis (BBC News, 2020).
September 2018	08.30	Sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan penebangan kayu yang mengarah pada konfrontasi kekerasan (Human Rights Watch, 2018).
December 2017	5:00	Demonstrasi atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan polisi (Al Jazeera, 2017).

Sumber: diolah oleh peneliti (2024)

Tabel di atas menguraikan beberapa contoh konflik sosial di Papua yang terjadi pada berbagai waktu antara tahun 2017 dan 2021. Setiap entri mencantumkan tanggal, waktu, dan penjelasan singkat mengenai

konflik tersebut.

Pada bulan Januari 2019, masyarakat adat Papua melakukan protes damai pada pukul 10.00, menyerukan otonomi yang lebih besar di Indonesia (Duncan, 2018). Pada bulan Juni 2020, bentrokan terjadi antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa pada pukul 14.00, yang dipicu oleh penangkapan para aktivis (BBC News, 2020). Demikian pula, sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan penebangan kayu menyebabkan konfrontasi dengan kekerasan pada pukul 08.30 pada bulan September 2018 (Human Rights Watch, 2018).

Pada bulan Desember 2017, demonstrasi meletus pada pukul 17.00 menyusul tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan polisi (Al Jazeera, 2017). Baru-baru ini, pada bulan Maret 2021, protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah mengakibatkan bentrokan dengan penegak hukum pada pukul 15.00 (The Jakarta Post, 2021).

Contoh-contoh ini menggambarkan beragamnya sifat konflik sosial di Papua, mulai dari protes menuntut otonomi hingga konfrontasi mengenai hak atas tanah dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Konflik-konflik tersebut menggarisbawahi kompleksnya kondisi sosio-politik di Papua dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

Dalam konteks Papua, penerapan kebijakan otonomi menemui harapan dan skeptisisme. Meskipun ada yang melihatnya sebagai solusi potensial untuk mengatasi ketidakadilan historis dan memberdayakan masyarakat adat, ada pula yang melihatnya hanya sebagai isyarat belaka yang gagal mengatasi akar penyebab konflik sosial. Kompleksitas dinamika ini menyoroti perlunya pemahaman yang berbeda mengenai faktor sejarah, politik, dan sosial yang berperan dalam pembentukan implementasi otonomi di Papua. Hanya dengan mengatasi ketegangan-ketegangan mendasar inilah kebijakan otonomi dapat benar-benar

memberdayakan masyarakat lokal dan mendorong perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Salah satu faktor kunci yang mendorong pengaruh konflik sosial terhadap pelaksanaan otonomi adalah sifat perebutan kekuasaan politik di Papua. Adanya persaingan klaim legitimasi, termasuk aspirasi masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan penegasan kedaulatan pemerintah Indonesia, mempersulit upaya pelimpahan kekuasaan dan sumber daya kepada pemerintah daerah (Kammen & McDonnell, 2019). Kontestasi otoritas politik ini terwujud dalam ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang berdampak pada efektivitas kebijakan otonomi dan memperburuk keresahan sosial.

Selain itu, konteks sejarah penjajahan dan perjuangan kemerdekaan yang sedang berlangsung di Papua menambah kompleksitas proses penerapan otonomi. Warisan ketidakadilan dan marginalisasi masyarakat adat di masa lalu telah memicu kebencian dan penolakan terhadap kontrol eksternal (Viartasiwi, 2018). Ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah Indonesia semakin menghambat keberhasilan pelimpahan kekuasaan dan sumber daya kepada pemerintah daerah. Keluhan yang belum terselesaikan dan konflik yang belum terselesaikan terus memicu kerusuhan sosial dan menghambat kemajuan dalam mencapai otonomi yang berarti bagi masyarakat Papua (Macleod, 2011).

Apalagi, sekuritisasi persoalan otonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia semakin mempersulit pelaksanaan otonomi daerah di Papua. Masalah keamanan, khususnya yang terkait dengan gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata, sering kali lebih diutamakan daripada upaya mengatasi keluhan sosial yang mendasarinya (Simmons, 2020). Sekuritisasi ini mengarah pada militerisasi dan pendekatan pemerintahan yang keras, melemahkan

legitimasi kebijakan otonomi dan melanggengkan siklus konflik.

Selain itu, isu sekuritisasi otonomi juga menghambat perkembangan dialog dan negosiasi yang bermakna antara pemerintah Indonesia dan perwakilan Papua. Dengan menganggap otonomi sebagai isu keamanan, pemerintah membatasi ruang bagi penyelesaian damai dan memperburuk ketegangan di kawasan (Viartasiwi, 2014). Pendekatan ini tidak hanya mengasingkan penduduk lokal namun juga mengasingkan calon sekutu yang dapat mendukung penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Untuk benar-benar mencapai otonomi yang berarti bagi masyarakat Papua, penting untuk beralih dari sekuritisasi ke pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif yang mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Araf, 2011).

Faktor kunci lain yang mendorong hubungan antara konflik sosial dan pelaksanaan otonomi adalah peran aktor eksternal dan kepentingan pribadi. Proyek ekstraksi sumber daya, misalnya, sering kali memperburuk ketegangan sosial dengan memicu persaingan atas lahan, sumber daya alam, dan peluang ekonomi (Duncan, 2018). Proyek-proyek ini sering dikaitkan dengan perusahaan multinasional dan lembaga pemerintah, yang kepentingannya mungkin tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal. Akibatnya, kebijakan otonomi menjadi terjerat dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang lebih luas, sehingga mempengaruhi implementasinya dan memperburuk konflik sosial.

Dalam banyak kasus, masyarakat lokal menjadi terpinggirkan dan kehilangan haknya ketika mereka berjuang untuk menegaskan hak-hak mereka dan melindungi tanah mereka. Dinamika kekuasaan yang berperan dalam situasi ini sangatlah kompleks, dimana aktor eksternal sering kali mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan

keputusan (Halmin & Looney, 2006). Hal ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga semakin memperdalam kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan mereka yang paling terkena dampak proyek ekstraksi sumber daya. Oleh karena itu, upaya mencapai otonomi tidak hanya menjadi soal pemerintahan mandiri, namun juga menjadi sarana untuk melawan tekanan eksternal dan menegakkan hak-hak komunitas yang terpinggirkan (Tranchant, 2016).

Selain itu, kurangnya partisipasi dan konsultasi yang berarti dengan masyarakat lokal melemahkan legitimasi dan efektivitas kebijakan otonomi dalam mengatasi keluhan sosial. Keterlibatan yang terbatas dengan para pemimpin adat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok marginal melanggengkan perasaan dikucilkan dan diasingkan, sehingga memicu penolakan terhadap inisiatif otonomi (Lalwani & Ventura, 2020). Tanpa adanya dialog yang tulus dan proses pengambilan keputusan yang inklusif, kebijakan otonomi berisiko dianggap sebagai upaya yang bersifat top-down (dari atas ke bawah) dibandingkan sebagai mekanisme untuk memberdayakan masyarakat lokal.

Kurangnya partisipasi yang berarti juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap dinamika budaya dan sosial yang unik dalam komunitas tersebut. Tanpa masukan dari pihak yang terkena dampak langsung, kebijakan otonomi mungkin gagal mengatasi akar penyebab keluhan sosial dan malah memperburuk ketegangan yang ada (Kambu et al., 2022). Agar inisiatif otonomi dapat berhasil, para pembuat kebijakan harus memprioritaskan keterlibatan dan kolaborasi yang tulus dengan para pemangku kepentingan lokal dalam perancangan dan implementasi kebijakan-kebijakan ini. Hanya melalui proses yang inklusif dan transparan maka otonomi dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pemberdayaan dan perubahan sosial (Esonu & Kavanamur, 2011).

2. Implikasi Konflik Sosial terhadap Keamanan Daerah

Konflik sosial di Papua mempunyai implikasi besar terhadap keamanan regional, dan berbagai faktor berkontribusi terhadap kompleksnya dinamika keamanan di wilayah tersebut. Diskusi ini bertujuan untuk menilai dampak konflik sosial terhadap hasil keamanan regional dan mengkaji bagaimana kebijakan otonomi bersinggungan dengan dinamika keamanan, baik dalam hal memperburuk atau memitigasi risiko keamanan di wilayah yang terkena dampak konflik (Sarjito, 2023a).

Konflik sosial di Papua seringkali berwujud kekerasan, kerusuhan sipil, dan ketegangan antar kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Keluhan terkait hak atas tanah, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi politik memicu konflik-konflik ini, sehingga menciptakan lingkungan keamanan yang mudah berubah (Kammen & McDonnell, 2019). Kehadiran gerakan separatis bersenjata semakin memperburuk risiko keamanan, yang menyebabkan bentrokan dengan pasukan keamanan dan menimbulkan tantangan terhadap pemerintahan dan stabilitas di kawasan.

Konflik-konflik ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan penduduk lokal, namun juga mempunyai implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas dan keamanan regional. Keterkaitan yang kompleks antara keluhan sejarah, marginalisasi politik, dan kesenjangan ekonomi menambah kompleksitas dinamika konflik di Papua (Druce, 2020). Selain itu, aktor eksternal, seperti perusahaan multinasional dan pemerintah asing, berperan dalam memperburuk ketegangan dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan memicu keluhan yang ada. Oleh karena itu, mengatasi akar penyebab konflik di Papua memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi (Hammar et al., 2021).

Salah satu dampak konflik sosial terhadap keamanan regional adalah militerisasi wilayah yang dilakukan pemerintah Indonesia. Menanggapi aktivitas separatis dan ancaman terhadap persatuan nasional, pasukan keamanan telah dikerahkan ke Papua, sehingga mengarah pada pendekatan yang keras terhadap tata kelola dan sekuritisasi isu otonomi (Simmons, 2020). Militerisasi ini tidak hanya memperburuk ketegangan tetapi juga melemahkan upaya untuk mengatasi keluhan sosial, yang mengganggu siklus kekerasan dan ketidakamanan.

Selain itu, militerisasi Papua juga telah menarik perhatian dan kritik internasional, dimana organisasi hak asasi manusia mendokumentasikan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Taktik opresif yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak hanya melanggar hak-hak masyarakat Papua namun juga membuat konflik tidak akan berakhir dengan damai (Hernawan, 2020). Selain itu, militerisasi di kawasan ini semakin memperburuk hubungan dengan negara-negara tetangga, khususnya Australia dan Selandia Baru, yang telah menyatakan keprihatinan mengenai dampak konflik terhadap stabilitas regional. Oleh karena itu, mengatasi konflik sosial di Papua memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan masalah keamanan tetapi juga faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi penyebab konflik tersebut (Alexander, 2010).

Selain itu, konflik sosial melemahkan kepercayaan terhadap institusi dan struktur pemerintahan, mengikis legitimasi kebijakan otonomi dan memperburuk risiko keamanan. Dengan tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mengatasi keluhan dan mendorong tata kelola yang inklusif, komunitas yang terpinggirkan mungkin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk

mengungkapkan rasa frustrasi mereka dan menegaskan hak-hak mereka (Duncan, 2018). Kurangnya kepercayaan dan legitimasi melemahkan efektivitas kebijakan otonomi dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di Papua.

Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus mengatasi akar penyebab konflik sosial dan berupaya membangun kepercayaan dan inklusivitas dalam komunitas yang terpinggirkan (Hadi, 2021). Hal ini dapat dicapai melalui struktur tata kelola yang transparan dan akuntabel, dialog yang bermakna dengan para pemangku kepentingan, dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang memicu ketegangan. Dengan mengatasi permasalahan ini, kebijakan otonomi dapat menjadi lebih efektif dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di Papua, yang pada akhirnya akan menghasilkan penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan (Ismail, 2023).

Kebijakan otonomi bersinggungan dengan dinamika keamanan dalam cara yang kompleks, sehingga membentuk hasil keamanan regional di wilayah yang terkena dampak konflik. Di satu sisi, kebijakan otonomi berpotensi mengatasi keluhan mendasar dan memberdayakan masyarakat lokal, sehingga mengurangi pemicu konflik sosial dan meningkatkan keamanan regional (Lalwani & Ventura, 2020). Dengan mendelegasikan kekuasaan dan sumber daya kepada pemerintah daerah, kebijakan otonomi dapat mendorong kepemilikan dan partisipasi daerah, menumbuhkan rasa keagenan dan inklusivitas di kalangan kelompok marginal.

Di sisi lain, kebijakan otonomi juga dapat menjadi pedang bermata dua, karena kebijakan otonomi secara tidak sengaja dapat memperburuk ketegangan yang ada dan memicu konflik lebih lanjut (Sarjito, 2024). Pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah dapat menimbulkan persaingan dan perebutan kekuasaan di antara berbagai kelompok, yang berpotensi

meningkat menjadi konfrontasi dengan kekerasan. Selain itu, kebijakan otonomi dapat menciptakan perpecahan dan perpecahan baru dalam masyarakat, sehingga semakin memecah-belah tatanan sosial yang sudah rapuh (Juon & Bochsler, 2023). Oleh karena itu, meskipun otonomi dapat menjadi alat yang berharga dalam penyelesaian konflik, otonomi harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan pemahaman menyeluruh terhadap konteks lokal untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan (Juon, 2024).

Namun, kebijakan otonomi juga dapat memperburuk risiko keamanan jika diterapkan tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan mekanisme penyelesaian konflik. Sekuritisasi isu otonomi oleh pemerintah Indonesia, misalnya, dapat mengarah pada tindakan represif dan pelanggaran hak asasi manusia, yang semakin mengasingkan masyarakat lokal dan memicu kebencian (Budiardjo & Liong, 2016). Selain itu, distribusi sumber daya dan manfaat yang tidak merata akibat kebijakan otonomi dapat memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi, sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik mengenai akses terhadap tanah, sumber daya alam, dan peluang ekonomi.

Keluhan historis, ketegangan etnis, dan persaingan kekuasaan politik di kalangan komunitas marginal juga dapat memicu konflik-konflik ini (Sarjito, 2023c). Selain itu, kurangnya proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipasi yang berarti dari masyarakat yang terkena dampak dalam pengembangan dan implementasi kebijakan otonomi dapat melemahkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan memperburuk perpecahan sosial. Para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan dinamika sosial yang kompleks dan mekanisme penyelesaian konflik untuk menjamin penerapan kebijakan otonomi yang berkelanjutan dan damai (Sihaloho et al., 2023).

3. Strategi Peningkatan Efektivitas

Otonomi Daerah di Tengah Konflik Sosial di Papua

Meningkatkan efektivitas otonomi daerah di tengah konflik sosial di Papua memerlukan pendekatan multifaset yang mengatasi keluhan mendasar, mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif, dan mendorong inisiatif pembangunan perdamaian. Dengan memanfaatkan bukti empiris dan studi kasus, diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi praktis dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong otonomi berkelanjutan dan perdamaian di kawasan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah adalah dengan memprioritaskan proses pengambilan keputusan inklusif yang melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat lokal dan pemimpin adat. Memberdayakan kelompok marginal untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi keluhan sosial dan membangun kepercayaan terhadap lembaga otonomi (Abel, 2019). Pendekatan ini menumbuhkan kepemilikan dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan otonomi responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua.

Selain itu, mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif juga dapat membantu mencegah konflik dan mendorong kohesi sosial di kawasan. Dengan membiarkan semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, lembaga-lembaga otonomi dapat berupaya mencapai konsensus dan resolusi konflik. Hal ini dapat membantu mengatasi ketegangan dan keluhan mendasar yang mungkin timbul akibat ketidakadilan atau marginalisasi dalam sejarah. Pada akhirnya, pendekatan otonomi yang lebih inklusif dapat menciptakan stabilitas dan perdamaian yang lebih baik di Papua, serta membuka jalan bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya (Sasmita, 2023).

Selain itu, mendorong inisiatif

dialog dan rekonsiliasi dapat membantu membangun jembatan antara pihak-pihak yang berkonflik dan mengurangi ketegangan di kawasan. Membangun platform untuk dialog, mediasi, dan penyelesaian konflik memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi konstruktif dan mencari penyelesaian damai atas perselisihan yang sudah berlangsung lama (Samudro et al., 2022). Dengan memupuk saling pengertian dan kepercayaan, inisiatif-inisiatif ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi kebijakan otonomi yang efektif.

Hal ini pada akhirnya dapat mengarah pada kohesi sosial dan stabilitas yang lebih besar di kawasan ini. Selain itu, berinvestasi dalam pendidikan dan peluang ekonomi bagi komunitas yang terpinggirkan dapat membantu mengatasi keluhan mendasar dan mendorong pembangunan inklusif. Dengan mengatasi akar penyebab konflik dan kesenjangan, pemerintah dapat membuka jalan bagi perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warga negara. Melalui kombinasi dialog, rekonsiliasi, dan pembangunan inklusif, kawasan dapat bergerak menuju masa depan yang lebih damai dan sejahtera (Koibur, 2021).

Berinvestasi dalam pembangunan sosio-ekonomi dan proyek infrastruktur merupakan strategi penting lainnya untuk meningkatkan otonomi daerah di tengah konflik sosial. Mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, dapat mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan, sehingga mengurangi pemicu konflik sosial (Jones, 2018). Selain itu, inisiatif pembangunan infrastruktur mendorong peluang dan konektivitas ekonomi, mendorong integrasi dan stabilitas regional.

Dengan berinvestasi pada proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi, daerah dapat

meningkatkan akses terhadap pasar dan menarik investasi, merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini tidak hanya memperkuat perekonomian lokal namun juga meningkatkan ketahanan kawasan terhadap guncangan eksternal, seperti bencana alam atau kemerosotan ekonomi (Rizal et al., 2019). Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat memfasilitasi penyediaan layanan penting, seperti air bersih dan listrik, meningkatkan kualitas hidup warga dan mengurangi ketegangan sosial. Secara keseluruhan, investasi dalam pembangunan sosio-ekonomi dan proyek infrastruktur sangat penting untuk mendorong otonomi daerah dan membangun masa depan yang lebih damai dan sejahtera bagi semua orang (Fauzi et al., 2019).

Memasukkan sistem pengetahuan tradisional dan adat ke dalam struktur pemerintahan juga dapat meningkatkan efektivitas otonomi daerah di Papua. Lembaga adat dan hukum adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (Sagrim, 2022). Dengan mengakui dan mengintegrasikan sistem tata kelola masyarakat adat ke dalam kerangka otonomi, para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan pengetahuan dan praktik lokal untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Sonbait et al., 2021).

Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil kepemilikan atas pembangunan mereka namun juga memastikan bahwa perspektif budaya dan lingkungan mereka yang unik juga diperhitungkan. Dengan membina kolaborasi antara pemimpin adat dan pejabat pemerintah, pendekatan pemerintahan yang lebih holistik dan inklusif dapat dicapai (Sarjito, 2023b). Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan efektivitas otonomi daerah di Papua tetapi juga mendorong kohesi sosial dan keharmonisan dalam komunitas yang

beragam di wilayah tersebut. Dengan cara ini, integrasi sistem pengetahuan tradisional dan adat ke dalam struktur pemerintahan dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun masa depan yang lebih berketahanan dan damai bagi seluruh penduduk Papua (Pelupessy, 2022).

Pembelajaran dari pengalaman masa lalu di Papua dan wilayah lain yang terkena dampak konflik dapat menjadi masukan bagi intervensi kebijakan di masa depan yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah dan pembangunan perdamaian. Studi kasus mengenai keberhasilan inisiatif otonomi, seperti yang terjadi di Aceh dan Mindanao, memberikan wawasan berharga mengenai mekanisme dan strategi yang mendorong perdamaian dan rekonsiliasi berkelanjutan (Simmons, 2020). Dengan menganalisis pengalaman-pengalaman ini, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan konteks unik Papua.

Studi kasus ini menunjukkan pentingnya dialog inklusif, keterlibatan masyarakat, dan peningkatan kapasitas dalam menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya mengatasi keluhan yang mendasarinya, mendorong keadilan sosial, dan memastikan partisipasi yang berarti dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengambil pelajaran dari hal ini, para pembuat kebijakan dapat merancang pengaturan otonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar penyebab konflik dan mendorong stabilitas jangka panjang di Papua (Christawan et al., 2023). Selain itu, dengan memasukkan perspektif lokal dan pengetahuan tradisional ke dalam pengembangan kebijakan, pihak berwenang dapat memastikan bahwa inisiatif otonomi sesuai dengan budaya dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua (Sulistiani, 2024).

Selain itu, keterlibatan dengan

organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra internasional dapat memberikan dukungan dan keahlian yang berharga dalam penerapan kebijakan otonomi yang efektif di Papua. Pendekatan kolaboratif yang memanfaatkan pengetahuan lokal dan keahlian internasional dapat membantu mengatasi tantangan kompleks dan mendorong pembangunan konsensus di antara para pemangku kepentingan (Lalwani & Ventura, 2020). Dengan membangun kemitraan dan jaringan, para pembuat kebijakan dapat memobilisasi sumber daya dan keahlian untuk mendukung upaya pembangunan perdamaian dan pembangunan di Papua.

Pendekatan kolaboratif ini juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan otonomi dilaksanakan secara inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan bekerja sama dengan beragam pemangku kepentingan, para pembuat kebijakan dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif yang mendorong perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di Papua. Selain itu, keterlibatan dengan mitra internasional dapat membantu memastikan bahwa kebijakan otonomi di Papua sejalan dengan standar dan praktik terbaik internasional, sehingga semakin meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan tersebut (McCormick, 2011).

SIMPULAN

Konflik sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah di Papua, dengan berbagai faktor yang mendorong hubungan tersebut. Sifat otoritas politik yang diperebutkan, sekuritisasi isu otonomi, peran aktor eksternal, dan kurangnya partisipasi berarti berkontribusi pada dinamika kompleks yang membentuk hasil kebijakan dan struktur pemerintahan. Dengan memahami faktor-faktor ini, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan efektif untuk

mendorong otonomi dan perdamaian di kawasan.

Konflik sosial mempunyai implikasi yang luas terhadap keamanan regional di Papua, dimana kebijakan otonomi bersinggungan dengan dinamika keamanan dalam cara yang kompleks. Meskipun kebijakan otonomi berpotensi mengatasi keluhan mendasar dan mendorong perdamaian dan stabilitas, kebijakan otonomi juga dapat memperburuk risiko keamanan jika diterapkan tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan mekanisme penyelesaian konflik. Dengan memahami implikasi ini, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan efektif untuk meningkatkan keamanan dan perdamaian regional di Papua.

Meningkatkan efektivitas otonomi daerah di tengah konflik sosial di Papua memerlukan pendekatan holistik yang mengatasi keluhan mendasar, mendorong tata kelola yang inklusif, dan mendorong inisiatif pembangunan perdamaian. Dengan memprioritaskan partisipasi yang berarti, dialog, pembangunan sosio-ekonomi, dan sistem pengetahuan tradisional, para pembuat kebijakan dapat membangun ketahanan dan mendorong perdamaian berkelanjutan di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, R. (2019). Local governance in Papua, Indonesia: A case study of the challenges of political autonomy and sustainable development. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(3), 348–367.
- Al Jazeera. (2017, December 2). *Scores arrested in West Papua as separatist rallies held*. <https://www.aljazeera.com/news/2017/12/2/scores-arrested-in-west-papua-as-separatist-rallies-held>(<https://www.aljazeera.com/news/2017/12/2/scores-arrested-in-west-papua-as-separatist-rallies-held>)
- Alexander, R. (2010). Confronting militarization: Intersections of gender (ed) violence, militarization, and resistance in the Pacific. *Gender, War, and Militarism: Feminist Perspectives*, 69–79.
- Araf, A. (2011). *Securitization in Papua: The Implication of Security Approach towards Human Rights Condition in Papua*. Imparsial, the Indonesian Human Rights Monitor.
- BBC News. (2020, June 12). *Clashes in Indonesia's Papua as demonstrators demand referendum*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-53048215>(<https://www.bbc.com/news/world-asia-53048215>)
- Bertrand, J. (2014). Autonomy and Stability: The Perils of Implementation and “Divide-and-Rule” Tactics in Papua, Indonesia. *Nationalism and Ethnic Politics*, 20(2), 174–199.
- Brown, E. (2017). Negotiating autonomy: Assessing regional autonomy arrangements in conflict-affected states. *Journal of Conflict Resolution*, 61(6), 1283–1308.
- Budiardjo, C., & Liong, L. (2016). West Papua: The struggle for independence. *Journal of Pacific History*, 51(3), 294–314.
- Christawan, E., Perwita, A. A. B., Midhio, I. W., Hendra, A., & Sumertha, I. G. (2023). *Papua as the Window of Indonesia's Spirit for the Melanesian Communities*.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Djani, S. (2017). Implementing regional autonomy in Indonesia: The experience of Papua. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(1), 71–90.
- Druce, S. C. (2020). Political impasse vs economic development: a history and analysis of the West Papua conflict in Indonesia. *Managing Conflicts in a Globalizing ASEAN: Incompatibility Management through Good Governance*, 89–116.
- Duncan, C. (2018). From heart of darkness to bright future: Extractive industry development in Papua. *The Extractive Industries and Society*, 5(2), 182–189.
- Esonu, B., & Kavanamur, D. (2011). Exploring the relationship between the level of stakeholder participation and local-level government performance in Papua New Guinea: The case of Wampar local level government in Morobe province. *International Public Management Review*, 12(1), 95–111.
- Fauzi, F. Z., Murti, A. A. G. B., Imamah, L. A., & Hapsari, N. (2019). Infrastructure Development in Papua: Features and Challenges. *Policy & Governance Review*, 3(3), 225–243.
- Garcia, J. (2020). Quantifying the impact of social conflict on regional autonomy outcomes: Evidence from subnational regions. *Journal of Peace Research*, 57(1), 135–148.
- Ghai, Y. (2000). *Autonomy as a Strategy for Diffusing Conflict*. National Academies Press.
- Hadi, A. (2021). The Dynamics of Ethnonationalism and Conflict Resolution in Papua. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 4(02), 267–282.
- Halmin, M. Y., & Looney, R. E. (2006). *NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL AUTONOMY IN WEST PAPUA, INDONESIA: PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS*.
- Hammar, R., Samangun, C., Malik, Y., & Luturmas, A. (2021). Spatial Planning for Indigenous Law Communities to Solve Social Conflict Resolution in West Papua Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 405–423.
- Hernawan, B. (2020). Papua Under the State of Exception. *Antropologi Indonesia*, 41(1), 52–62.
- Human Rights Watch. (2018). *Indonesia: Papua Land Rights Disputes End in Violence*.
<https://www.hrw.org/news/2018/09/25/indonesia-papua-land-rights-disputes-end-violence>](<https://www.hrw.org/news/2018/09/25/indonesia-papua-land-rights-disputes-end-violence>)
- Ismail, F. (2023). The Dynamics of Conflict Resolution and the Potential for Disintegration in West Papua in the Context of the Unity of the Republic of Indonesia: An Analysis of Conflict and Disintegration in the Papua Region. *Pasundan Social Science Development*, 4(1), 1–7.
- Jones, P. (2018). Addressing social grievances in conflict-affected regions: The role of autonomy.

- International Studies Quarterly*, 62(1), 1695–1722.
- Juon, A. (2024). Territorial Autonomy and the Trade-Off between Civil and Communal Violence. *American Political Science Review*, 1–17.
- Juon, A., & Bochsler, D. (2023). The wrong place at the wrong time? Territorial autonomy and conflict during regime transitions. *Comparative Political Studies*, 56(13), 1996–2029.
- Kambu, Z., Jinca, M. Y., Pallu, M. S., & Ramli, M. I. (2022). Meta synthesis of community participation model on Trans-Papua road development. *Civil Engineering Journal*, 8(11), 2476–2489.
- Kammen, D., & McDonnell, S. (2019). The dynamics of violent conflict in Indonesia: A case study of West Papua. *Journal of Conflict Resolution*, 63(7), 1695–1722.
- King, J. M. (2019). A soul divided: The UN's misconduct over West Papua. *Portal: Journal of Multidisciplinary International Studies*, 16(1/2), 59–81.
- King, P. (2019). Papua and West Papua: Challenges to Indonesia's territorial integrity. *Asian Affairs*, 50(4), 543–560.
- Koibur, S. O. D. (2021). Papua Conflict Reconciliation Model and Strategies. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 8(4), 293–303.
- Kossay, M. (2022). Conceptual Study Of Central Government Policies In Resolving The Papua Conflict In Indonesia (Papua Special Autonomy Perspective). *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(3), 512–526.
- Lalwani, A., & Ventura, M. (2020). Enhancing regional autonomy in Papua: Lessons from comparative experiences. *Journal of Comparative Politics*, 52(2), 215–231.
- Macleod, J. (2011). *The Struggle for Self-Determination in West Papua (1969-present)*. <http://www.nonviolent-conflict.org/>
- McCormick, A. (2011). Some partners are more equal than others: EFA and Civil Society in Papua New Guinea and Vanuatu education policy processes. *International Education Journal: Comparative Perspectives*, 10(2).
- O'Rourke, K. (2015). The politics of representation in Papua New Guinea and West Papua. *Pacific Affairs*, 88(1), 5–26.
- Pelupessy, E. (2022). Application of Technology and Science of Intellectual Property Rights in the Papua Traditional Culture Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(8), 111–126.
- Prabowo, P. A., Supriyono, B., Noor, I., & Muluk, M. K. (2020). The Influence of the Special Autonomy Policy of the Papua Province on the Welfare of Its People. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 203–223.
- Rizal, A., Junianto, J., Sahidin, A., & Zaida, Z. (2019). Risk analysis of Trans Papua corridor road infrastructure development in West Papua and Papua Province of Indonesia. *World Scientific News*, 126, 261–275.

- Rumbiak, I. (2021). Resource extraction and social conflict in Papua: A case study of the Grasberg mine. *Resources Policy*, 71(102015).
- Sagrim, M. (2022). *Traditional knowledge of land management in Maybrat District, West Papua Province, Indonesia: implication for agriculture development*.
- Samudro, E. G., Saragih, H. J. R., Widodo, P., Sumantri, S. H., Anwar, S., & Malik, I. (2022). Conflict Resolution Efforts in Papua: Reconciliation Approach. *Resmilitaris*, 12(4), 1645–1658.
- Samuel, H. (1993). The clash of civilizations. *Foreign Affairs*, 72(3), 22–49.
- Sarjito, A. (2023a). In The Shadows of Governance: Exploring the Untamed Territories of Administrative Discretion. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 295–310.
- Sarjito, A. (2023b). Strengthening The Sense of Indonesian Nationalism from The Perspective of The Papuan Society. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 4(2), 575–588.
- Sarjito, A. (2023c). Towards the Achievement of Papua's Independence in the Framework of Statehood. *Society*, 11(2), 343–358.
- Sarjito, A. (2024). Peran Intelijen Melalui Perumusan Kebijakan Pertahanan Negara dalam Perang Hibrida. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 7(1), 74–88.
- Sasmita, A. S. (2023). Ethnicity and Democracy: Managing Political Complexities in West Papua. *Muslim Politics Review*, 2(1), 112–132.
- Sihaloho, R. A. H., Hanita, M., & Pamungkas, C. (2023). Papua Conflict Resolution Challenges: The Linkage Of Relative Deprivation With The Spirit Of Separatism Of Indigenous Papuans. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 34, 4429–4453.
- Simmons, C. (2020). Autonomy, self-determination, and conflict resolution: Lessons from Papua New Guinea and Indonesia. *Conflict Resolution Quarterly*, 37(3), 319–339.
- Sonbait, L. Y., Manik, H., Warmetan, H., Wambrauw, Y. L., Sagrim, M., Djitmau, D. A., Wanggai, J., Rettob, B., & Murdjoko, A. (2021). *The natural resource management to support tourism: A traditional knowledge approach in Pegunungan Arfak Nature Reserve, West Papua, Indonesia*.
- Sulistiani, I. (2024). Communication Participatory in Community Empowerment Programs at the Indonesia-Papua New Guinea Border. *Migration Letters*, 21(4), 995–1011.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004). The social identity theory of intergroup behavior. In *Political psychology* (pp. 276–293). Psychology Press.
- The Jakarta Post. (2021, March 16). *Papuan students in Jakarta protest against government policies*. <https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/16/papuan-students-in-jakarta-protest-against-government-policies.html>
- Tranchant, J.-P. (2016). Is regional autonomy a solution to ethnic conflict? Some lessons from a dynamic analysis. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 22(4), 449–460.

Viartasiwi, N. (2014). Autonomy and Decentralization as Remedies?: Counterinsurgency Tactics for the West Papua Conflict in Democratic Indonesia. *立命館国際研究*, 27(1), 283–304.

Viartasiwi, N. (2018). The politics of history in West Papua-Indonesia conflict. *Asian Journal of Political Science*, 26(1), 141–159.